

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi yang berubah cepat dan kompetitif dengan permasalahan yang semakin kompleks memerlukan adanya penyesuaian tentang kebijakan sistem ekonomi serta perbaikan sistem keuangan, khususnya perbankan.

Kondisi perbankan nasional mengalami pasang surut yang cukup signifikan di dalam sejarah perkembangannya. Pada masa krisis ekonomi pertengahan tahun 1997 lalu, sektor perbankan merupakan salah satu industri yang mendapatkan dampak langsung paling parah. Selanjutnya, perbankan terus mengalami masa-masa sulit dimana banyak bank yang mengalami kemunduran kinerja akibat terjadinya krisis kepercayaan dari masyarakat.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

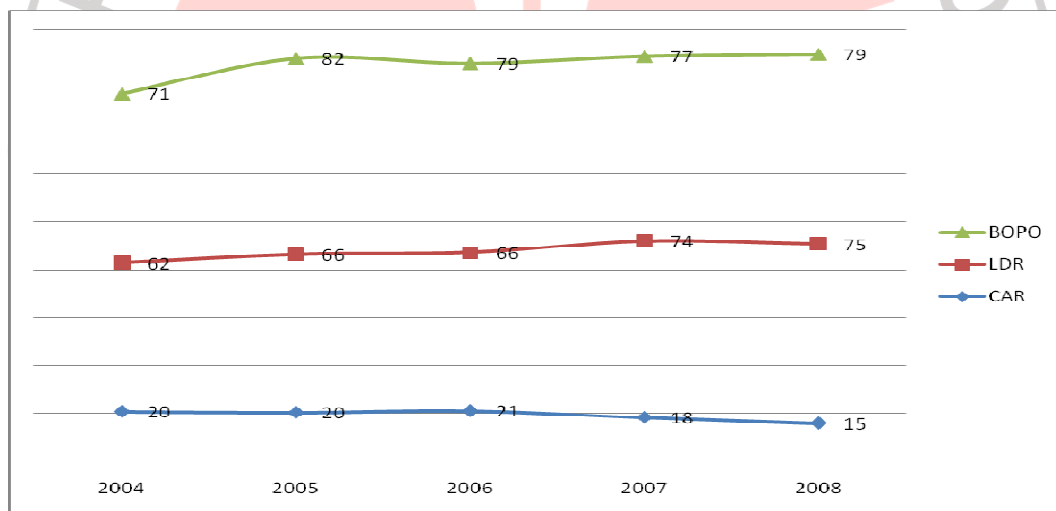
Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat luas karena kesehatan suatu bank adalah ukuran suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya.

Alat ukur atau indikator dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank diuraikan secara lebih rinci dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank pada dasarnya merupakan penilaian kualitatif sehingga faktor *judgement* merupakan hal yang dominan. Penilaian meliputi permodalan, kualitas assets, rentabilitas, manajemen, likuiditas, dan aspek lainnya. Pengukuran tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan surat edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam pedoman perhitungan tersebut dijelaskan bahwa tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai berdasarkan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkuantitatifkan komponen permodalan (CAR), kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas (BOPO), dan likuiditas (LDR). Informasi kesehatan bank hanya dapat diketahui sebagian dari laporan keuangan yang dipublikasikan. Laporan keuangan yang harus dipublikasikan yaitu: neraca, laporan rugi/laba, dan laba ditahan, serta laporan komitmen dan kontijensi.

Kinerja keuangan bank dapat dilihat dari indikator-indikator keuangan kunci, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan BOPO. CAR perbankan *go public* rata-rata berada di level 20% yang menunjukkan bahwa perbankan *go public* sangat siap untuk melakukan ekspansi kreditnya. Hal ini berlaku bagi LDR dan BOPO bank-bank *go public* yang berada pada kategori “SEHAT” yaitu rata-rata berada <110% untuk LDR dan <90% untuk BOPO. Seperti terlihat dalam grafik 1.1 di bawah ini, perkembangan CAR, LDR dan BOPO dari Tahun 2004 - 2008.

Grafik 1.1
CAR, LDR dan BOPO Bank Go Public



(Sumber: Laporan Keuangan Publikasi, diolah)

Proses pembangunan ekonomi di dunia secara alami menimbulkan kesempatan besar yang sama bagi semua jenis kegiatan ekonomi semua skala usaha. Pembangunan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia.

Beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah adalah keterbatasan modal kerja dan/atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi, SDM dengan kualitas yang baik (terutama manajemen dan teknisi produksi), informasi (khususnya mengenai pasar), dan kesulitan dalam pemasaran (termasuk distribusi). (Tambunan,2002:93).

UMKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama khususnya dalam aspek finansial: mobilisasi modal awal (*start up-capital*) dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang.

Disinilah salah satu permasalahan utama, mengapa UMKM sulit menjadi usaha besar, yaitu terganjal masalah pembiayaan. Untuk mengatasi masalah pembiayaan itu, perbankan diharapkan menjalankan peranannya sebagai lembaga intermediasi.

Permasalahan pembiayaan dikarenakan UMKM dinilai tidak *feasible* dan *bankable* bagi perbankan. Padahal pembiayaan UMKM dengan memberikan kredit tidak semata mengandung unsur yang bertujuan mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat, tetapi juga menjadi unsur yang menghasilkan *interest income*. Dengan demikian apabila perbankan berhasil menjalankan peranannya itu dengan baik, maka perbankan dapat mewujudkan peranannya sebagai “*agent of development*” dan sekaligus dapat tumbuh dengan sehat.

Fakta lain juga menunjukkan bahwa walaupun nilai kredit yang disalurkan perbankan *go public* ke sektor UMKM semakin meningkat, tetapi pada tahun belakangan ini secara umum pertumbuhannya justru semakin menurun. Seperti terlihat dalam Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 dibawah ini,

Tabel 1.1
Pertumbuhan Kredit UMKM

No	Nama Bank	2004	2005	2006	2007	2008
1	Bank Central Asia, Tbk		24%	9%	13%	41%
2	Bank CIMB Niaga Tbk		47%	20%	11%	119%
3	Bank Danamon Indonesia, Tbk		1%	28%	17%	15%
4	Bank Internasional Indonesia, Tbk		48%	32%	32%	20%
5	Bank Mandiri Tbk		439%	8%	49%	22%
6	Bank Negara Indonesia, Tbk		7%	11%	36%	26%
7	Bank OCBC Nisp Tbk		36%	13%	25%	6%
8	Bank Pan Indonesia Tbk		113%	89%	65%	23%
9	Bank Permata, Tbk		29%	27%	-8%	29%
10	Bank Rakyat Indonesia , Tbk		21%	10%	30%	39%

(Sumber: Laporan Tahunan Publikasi, diolah)

Bank Internasional Indonesia (BII) tahun 2005 menyalurkan kredit ke sektor UMKM tumbuh sebesar 48%. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2006 dan 2007 penyaluran kredit UMKM-nya menurun menjadi 32%. Pada tahun 2008, BII pun kembali mengalami penurunan penyaluran kredit ke sektor UMKM yaitu menjadi hanya sebesar 20% .

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70%-80% dari volume usaha bank. Selain itu, risiko *default* yang disebabkan ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban sesuai yang disepakati merupakan hal yang perlu memperoleh perhatian lebih, terutama kredit UMKM.

Berkenaan dengan itu, ketika manajemen bank menyusun kebijakan pemberian kreditnya tersebut, terdapat beberapa faktor yang turut dipertimbangkan (1) Posisi dan kekuatan permodalan bank, (2) Gambaran antara risiko dan margin yang mungkin akan dihadapi dan dihasilkan bank pada berbagai jenis pinjaman yang dapat diberikan oleh bank, (3) stabilitas sumber pendanaan, (4) gambaran perekonomian, (5) pengaruh dari kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh pemerintah atau otoritas moneter, (6) kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh staf bank, (7) besaran permintaan kredit dari target *market* bank.

Besaran modal bank akan menentukan seberapa jauh bank mampu menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Struktur modal yang kuat tentu akan lebih memberi peluang yang lebih besar bagi bank memberikan jangka waktu pinjaman yang lebih longgar dan lebih tahan guncangan risiko pula. Bank yang memiliki modal kuat tentu akan melirik UMKM sebagai pasar yang potensial penyaluran kreditnya.

Di samping itu perlu pula diperhatikan fakta bahwa modal bank merupakan unsur yang penting pula dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit yaitu gambaran antara risiko dan margin (laba) yang mungkin akan dihadapi dan dihasilkan bank pada berbagai jenis pinjaman yang dapat diberikan oleh bank. Keterbatasan modal juga merupakan salah satu pembatas ekspansi usaha bank, sehingga kemampuan manajemen bank untuk menghasilkan nilai tambah (laba) yang pada dasarnya merupakan proses pembentukan modal baru dari hasil usaha

juga menjadi terbatas. Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya maka tentu saja lama-kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank dengan kondisi demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat.

Di Indonesia, dilihat dari jumlah unit usahanya yang sangat banyak di semua sektor ekonomi dengan kontribusinya yang besar terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan, khususnya di daerah pedesaan dan bagi rumah tangga berpendapatan rendah, tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya UMKM.

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2007 tumbuh sebesar 6,3 persen terhadap tahun 2006, dengan total nilai mencapai Rp 3.957,4 triliun, dimana UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp 2.121,3 triliun atau 53,6 persen dari total PDB Indonesia.

Hasil produksi UMKM yang di ekspor keluar negeri mengalami peningkatan dari Rp 122,3 triliun tahun 2006 menjadi Rp 142,8 triliun tahun 2007. Untuk pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM menyumbang sebesar 3,6 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,3 persen di tahun 2007.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul: “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit UMKM Pada Bank-Bank *Go Public*.”

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana deskripsi tentang tingkat kesehatan bank yang diukur dengan CAR, BOPO dan LDR pada Bank-Bank *Go Public*
2. Seberapa besar jumlah penyaluran kredit UMKM yang diberikan Bank-Bank *Go Public*
3. Seberapa besar pengaruh tingkat kesehatan bank yang diukur dengan CAR, BOPO dan LDR terhadap jumlah penyaluran kredit UMKM yang diberikan Bank-Bank *Go Public*

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesehatan bank terhadap jumlah penyaluran kredit UMKM pada Bank *go public*.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Diketuinya tingkat kesehatan bank yang diukur dengan CAR, BOPO dan LDR pada Bank-Bank *Go Public*
2. Diketuinya jumlah penyaluran kredit UMKM yang diberikan oleh Bank-Bank *Go Public*

3. Diketuinya pengaruh tingkat kesehatan bank yang diukur dengan CAR, BOPO dan LDR terhadap jumlah penyaluran kredit UMKM yang diberikan Bank-Bank *Go Public*

1.4 Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian sudah seharusnya memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun dalam kajian praktisnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini peneliti dapat memahami penerapan dari teori-teori yang telah diperoleh serta dapat lebih mengetahui tentang tingkat kesehatan bank dan jumlah penyaluran kredit UMKM. Selain itu dapat dijadikan salah satu referensi hasil kajian empiris dan sebagai bahan pertimbangan titik tolak penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi pihak manajemen bank-bank *go public* yang menyalurkan kredit UMKM dalam menyempurnakan prinsip-prinsip dan kebijakan kredit UMKM-nya.